



PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA

KOMINFO
KABUPATEN BOMBANA

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DISKOMINFO
KABUPATEN BOMBANA
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini memberikan informasi tentang pencapaian kinerja dalam Bidang Komunikasi dan Informatika melalui hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Dalam Kurun Waktu Tahun 2022, namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentu akan menjadi motivasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan pembangunan yang lebih terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana untuk tahun mendatang.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini, semoga LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ini dapat menjadi acuan yang dapat memberikan arah pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selanjutnya.

Bombana, Januari 2023

Kepala Dinas,



SOFIAN BACO, ST, M.PW

Pembina, IV/a

NIP. 19770909 200604 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Kominfo dan Statistik	1
1.1.1 Landasan Hukum	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.3 Struktur Organisasi	2
1.2 Permasalahan dan Isu-isu strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	10
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	10
2.2 Perjanjian Kinerja Utama	11
2.3 Rencana Kerja 2022	12
2.4 Perjanjian Kinerja	22
2.5 Program, Kegiatan dan Anggaran	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik	25
3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Kominfo dan Statistik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD- APBDP tahun 2022 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana 2017 s.d. 2022.

1.1.1. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2022 disusun dengan landasan hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai tugas :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan pelayanan umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
4. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dengan mempertimbangan kondisi wilayah dan kebutuhan organisasi, sehingga susunan organisasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu tugas Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

2. Sekretariat

a). Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, administrasi keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.



- b). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - c). Sekretariat terdiri atas:
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- a). Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintahan Daerah serta pelayanan informasi publik di kabupaten serta di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan penyediaan komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
 - b). Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
 - Seksi Media Komunikasi Publik;
 - Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
 - Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik.
4. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- a). Bidang Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar, data center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan Pengembangan Internet, dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government dan Layanan System Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b). Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - c). Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terdiri atas:
 - Seksi Infrastruktur teknologi Informasi Komunikasi;
 - Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK;
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.



5. Bidang Statistik

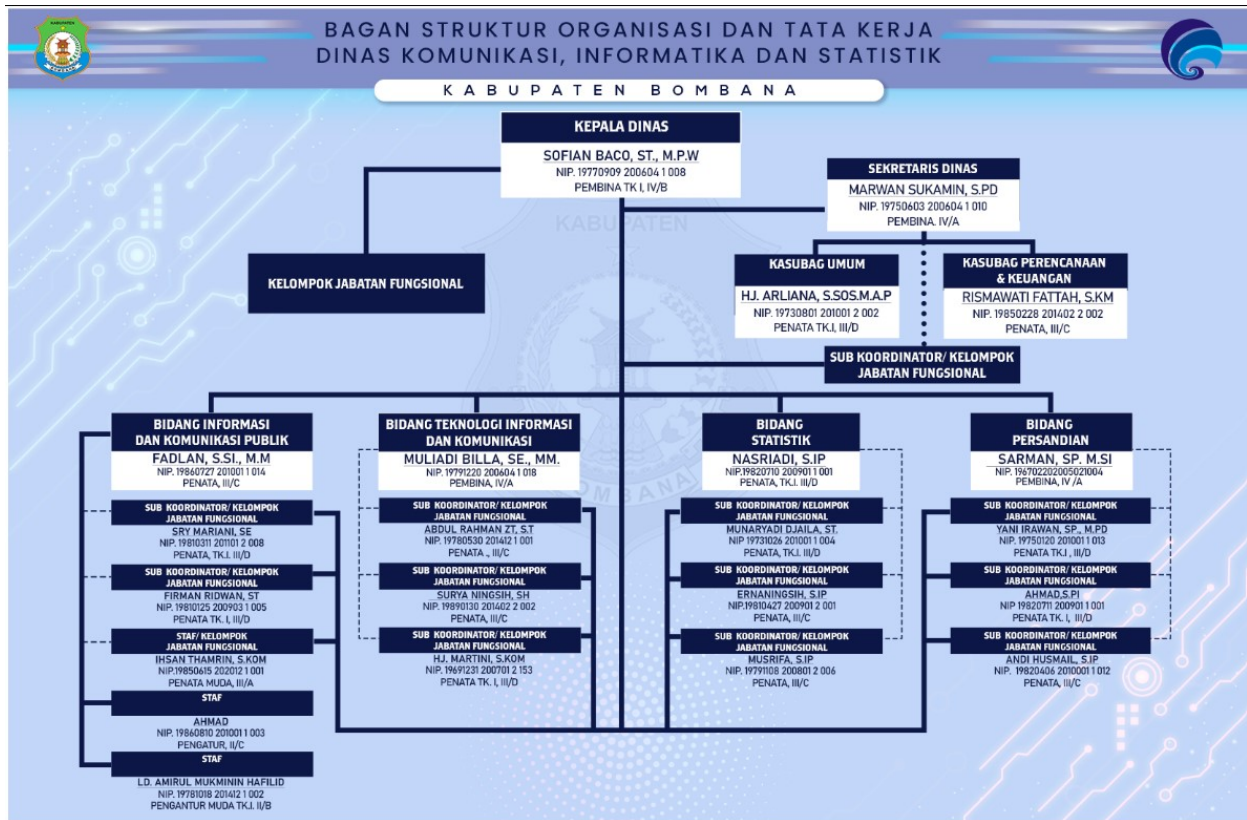
- a). Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan di Bidang Statistik
- b). Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c). Bidang Statistik terdiri atas:
 - Seksi Tata Kelola Statistik;
 - Seksi Kompilasi Admin Sosekpolhukam;
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistic

6. Bidang Persandian

- a). Bidang Persandian mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, pengelolaan, pengamanan, pengembangan kompetensi sumber daya, pengawasan dan evaluasi di Bidang Persandian.
- b). Bidang Persandian di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c). Bidang Persandian terdiri atas:
 - Seksi Tata Kelola Persandian;
 - Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.



Tabel 1. 1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana



Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Ket
1	II/b	1	Kepala Dinas
2	III/a	1	Sekretaris Dinas
3	III/b	4	Kepala Dinas
4	IV/a	2	Kasubag/ Kasie
5	Tenaga Sub koordinator	11	Jabatan Fungsional
6	Tenaga Administrasi	4	ASN Staf
7	Tenaga Adminstrasi	1	P3K
8	Tenaga Pendukung	7	Honorer K2
9	Tenaga Pendukung Lainnya	17	Honorer Non K
	Total	48	



Tabel 1.3

Keadaan Berdasarkan Golongan/ Ruang

No	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
1	IV/a	4 Orang	
Jumlah		4 Orang	
2	III/d	8 Orang	
3	III/c	7 Orang	
4	III/b	1 Orang	
5	III/a	1 Orang	
Jumlah		17 Orang	
6	II/c	1 Orang	
7	II/b	1 Orang	
Jumlah		2 Orang	
Total		23 Orang	

Tabel 1.4

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Pegawai	
		PNS/P3K	Tenaga Honorer
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	2 Orang	14 Orang
4	Diploma 3/Akademi	-	2 Orang
5	Strata 1 (S1)	17 Orang	8 Orang
6	Strata 2 (S2)	5 Orang	-
7	Starata (S3)	-	-
Jumlah		24 orang	24 Orang

Tabel 1.5

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	PNS/P3K	PHTT
1	Pria	15 Orang	12 Orang
2	Wanita	9 Orang	12 Orang
Jumlah		24 Orang	24 Orang

1.2. Permasalahan dan Isu - Isu Strategis

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Dinas Kominfo di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan



TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Bombana.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui: Pembuatan Website desa, kecamatan dan PD sebanyak 199 website serta Pembuatan Data Center.

Visi pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah “**Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 2017-2022**”. Dan untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi atau agenda utama pembangunan Kabupaten Bombana, yaitu:

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana

Penjabaran dari misi diatas adalah:

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah. Agenda percepatan pembangunan infrastruktur dimaksud meliputi:
 - Pembangunan infrastruktur tingkat wilayah Kabupaten Bombana
 - Pembangunan infrasutruktur pedesaan
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi
Dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi
Dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian danperikanan/ kelautansebagai andalan Utama.
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dankesehatan.



5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana

Dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Bombana yang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Bombana sejahtera (Munajah) 2017 - 2022. Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Olehnya itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana yang terlihat pada table berikut ini:



Tabel 1.6
Faktor Penghambat dan Pendorong PD terhadap Visi, Misi dan Pencapaian Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI	MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)				
	No	Misi.2 (Melanjutkan Reformasi Birokrasi)	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan akses / layanan informasi dan komunikasi	- Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota	-Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian baik dari segi kulaitas maupun jumlahnya	-Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, statistik dan persandian	
2	Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data	- Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	- Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database PD - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK -Belum optimalnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi, statistik dan persandian	-Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan -Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public -Kebutuhan pengembangan muatan e-government	

Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Bombana, maka isu-isu strategis pembangunan meliputi:

- Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik;
- Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government;
- Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (*Kekuatan dan Kelemahan*) serta Lingkungan Eksternal (*Peluang dan Tantangan*) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan *Tujuan, Sasaran* serta *Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran* dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan Misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2017-2022, adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas”

Dengan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut:

Sasaran yang hendak dicapai pada misi 2 adalah:

1. Meningkatnya akses / layanan Informasi dan Komunikasi;
2. Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data;
3. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bombana Oleh Inspektorat Daerah;

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi secara terintegrasi;
- b. Pengembangan system layanan e-government ;
- c. Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dibidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

d. Meningkatkan Predikat SAKIP PD

Strategi 1.

Kebijakan:

1. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi dan Informasi;
2. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas sistem jaringan komunikasi dan Informasi.

Strategi 2

Kebijakan:

1. Menyediakan server basis data;
2. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile.

Strategi 3

Kebijakan:

1. Menyediakan prosedur standar layanan informasi publik
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap PD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima.

Strategi 4

1. Adanya Laporan Kinerja Akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Yang Akuntabel

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bombana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing PD melalui keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017-2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bombana tahun 2022 adalah sebagai berikut:



TABEL 2.1
Indeks Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bombana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formula/Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya akses/ layanan Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Indeks	Indeks
			Terintegrasinya Data Statistik Sektoral ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan Statistik Dasar dan Sektoral yang Terintegrasi dengan SIPD	Ada / tidak	Adanya Statistik Dasar dan Sektoral Terintegrasi
2	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Nilai Predikat SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik oleh Inspektorat	Nilai	Nilai SAKIP

2.3 Rencana Kerja 2022

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke Dua dari Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra – PD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022, dengan Mepedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2004 – 2024. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan

bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2017-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2022 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) 2022**

3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Maksud Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2022 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2022 adalah untuk:

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2022.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 2.2
Rencana Program dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program Kerja/Kegiatan	Indikator Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas			Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah					
		1. Meningkatnya Akses / Layanan Informasi dan Komunikasi		Indeks SPBE	2.13	3.0			
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kerjasama dengan Media Massa	100	100	790.999.800	Diskominfo Kab. Bombana	Rumbia
			Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah layanan informasi yang dapat diakses masyarakat	0	1 App	10.000.000		
			Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi yang dapat diakses masyarakat	0	5 Jenis	780.999.800		
2			Program Aplikasi Informatika		28%	100%	1.952.097.750	Diskominfo Kab. Bombana	Rumbia
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung Jaringan Internet	9 OPD	32 OPD	1.094.804.000		



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) 2022**

			Pengelolaan e-governmet dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah BTS yang diawasi	58 Unit	65 unit	169.351.500		
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Layanan Informasi	71 Aplikasi	1 Aplikasi	422.943.650		
			Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan email berbasis sandi	0	54 OPD	154.998.700		
		2. Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintah untuk mempercepat pertukaran data		Persentase ketersediaan data/informasi sektoral	100	100%		Diskominfos Kab. Bombana	Rumbia
			Pengelolaan Pusat data Pemerintahan daerah	Jumlah data statistik yang terupdate	0	1 Jenis	58.961.950		
			Koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	0	1 Jenis	51.037.950		
2.	Mewujudkan Pelayanan Bioikrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Oleh Inspektorat daerah	Program Penunjang urusan Pemerintah		100%	100%	4.407.629.848	Diskominfos Kab. Bombana	Rumbia

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH****(LAKIP) 2022**

			Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Cakupan Laporan Perencanaan tepat waktu	100%	100%	103.674.050		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2.531.447.198		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	21.000.000		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	560.791.500		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan apatur	100%	100%	826.362.200		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	201.404.900		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Pelayanan Admiintrasi Perkantoran	100%	100%	162.950.000		

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan PD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup Outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan PD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja pimpinan PD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kominfo sudah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV yang dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.3

Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja 2022

Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bombana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	II	III	IV
1	Meningkatnya akses /layanan informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	3
2	Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintah untuk mempercepat pertukaran data	Cakupan statistik dasar dan sektoral yang terintegrasi	Ada
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	B

Tabel 2.4

Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.407.629.848	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp, 790.999.800	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.952.097.750	APBD
JUMLAH		Rp. 7.150.727.398	



2.5 Program, Kegiatan dan Anggaran

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan PD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik
Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.407.629.848
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Laporan Perencanaan tepat waktu	103.674.050
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	2.531.447.198
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	21.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	560.791.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan apatur	826.362.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	201.404.900
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Pelayanan Admiintrasi Perkantoran	162.950.000
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		790.999.800
	Monitoring Opini dan Apirasi Publik	Jumlah layanan informasi yang dapat diakses masyarakat	10.000.000



	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi yang dapat diakses masyarakat	780.999.800
3	Program Aplikasi Informatika		1.952.097.750
	<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>1.094.804.000</i>
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung Jaringan Internet	1.094.804.000
	<i>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</i>		<i>851.650.860</i>
	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah BTS yang diawasi	169.351.500
	Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Layanan Informasi	422.943.650
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan email berbasis sandi	154.998.700
	Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah data statistik yang terupdate	58.961.950
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	51.037.950
Jumlah			Rp. 7.150.727.398



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

Adapun pencapaian kinerja hasil perkembangan dan Pembangunan Bidang Informasi dan Komunikasi khususnya perkembangan Digital Government Service (DGS) sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jaringan TIK

Merupakan layanan fasilitas keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik:

- a. Peningkatan Bandwith sebanyak 100 Mbps untuk intra pemerintah daerah untuk 9 OPD
- b. Tersedianya dokumen Arsitektur SPBE serta nilai Indeks Evaluasi Mandiri untuk tahun 2022 yaitu 2.08
- c. Bertambahnya Aplikasi Khusus untuk pelayanan Adminstrasi khusus dan tersedianya dokumen pendukung adminstrasi bidang TIK
- d. Tersedianya Dokumen Perjanjian Pinjam pakai lahan untuk BTS BAKTi Kominfo dalam rangka menyukseskan indonesia meedeka sinyal sebanyak 50 site batch 1 dan 4 site di batch 2 dan peningkatan PAD pada sektor pengawasan dan pengendalian menara telkomunikasi komersil sebanyak 58 site
- e. Bertambahnya 1 unit kapasitas server Backup data

2. Konten Media Informasi

- a. Website (www.bombanakab.go.id)
- b. Facebook (@Diskominfos Kabupaten Bombana)
- c. Instagram (@diskominfos.kab.bombana)
- d. Youtube (diskominfo bombana)
- e. Tiktok (diskominfo bombana)

3. Bombana Smart Regency

Merupakan Aplikasi Smart City berbasis Android untuk mengelola informasi kabupaten, pengelolaan aplikasi online, saluran video, pengelolaan wisata dan budaya, pengelolaan pantauan harga pangan, pengelolaan angkutan, pengelolaan data kesehatan, pengelolaan Agenda, data kuliner, properti, lapak, kerjaan, dan lain-lain.

4. Kerjasama Media dan Aplikasi

Terdapat 14 Media yang MOU yang terdiri 4 Cetak 10 Media Online di tahun 2022. Dan terdapat 40 aplikasi yang aktif di website bombana yang dikelola oleh dinas kominfo.



5. SP4N-Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional "SP4N"-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat "LAPOR")
Merupakan salah satu Aplikasi penerapan dari e-government sebagai kanal pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Untuk meningkatkan interaksi Masyarakat dengan Pemerintah dengan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat. Terdapat 60 aduan yang masuk di aplikasi SPAN lapor sepanjang tahun 2022 dan langsung di teruskan kepada OPD yang bertanggung jawab.
6. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Merupakan salah satu kegiatan penerapan e-government untuk meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat dan interaktif, dan Membangun pengembangan sistem penyediaan dan layanan informasi publik.
7. Email Sanapati dan TTD ELEktronik
Email Sanapati adalah surat berbasis elektronik yang terhubung dengan Email BSSN RI. Dan Dinas Kominfo telah melayani sebanyak 26 Organisasi Perangkat Daerah yang telah menggunakan TTD Elektronik
8. Data Statistik
Terdapat 17 Organisasi perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan 13 OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut:



Capaian dan Realisasi Pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dapat di Lihat Pada Tabel. 3.1

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pada Bidang Informasi Komunikasi

Sasaran	Program Kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses/layanan informasi dan komunikasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kerjasama dengan media massa	100%	100%	100%
	Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat	1 App	1 App	100%
	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat	5 Jenis	5 Jenis	100%

Capaian Realisasi Bidang Informasi dan Komunikasi, Pada Tahun 2022 di Bidang Infokom terdapat satu Program Informasi dan Komunikasi dan 2 kegiatan yaitu Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di mana secara keseluruhan Program / Kegiatan tersebut Pelaksanaannya Mencapai 100%.



Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran	Program Kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses/Layanan Informasi dan Komunikasi	Program Aplikasi Informatika	Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Perangkat Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan layanan internet	32 OPD	9 OPD	28%
	Kegiatan Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten kota				
	Sub kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah BTS yang diawasi	65 Unit	58 Unit	89%
	Sub Kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi layanan informasi	1 Aplikasi	71 Aplikasi	140%

Capaian Realisasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pada Tahun 2022 di Bidang TIK Terdapat satu program yaitu aplikasi Informatika dengan 2 kegiatan yaitu pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang didalamnya ada 2 sub kegiatan yang masuk ke kegiatan bidang TIK yaitu: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik. Secara keseluruhan Program / Kegiatan tersebut Pelaksanaannya mencapai 85,6% , walaupun belum semua OPD yang terlayani dengan jaringan internet namun di tahun 2022 ada peningkatan bandwidth di banding tahun 2021 yaitu sebesar 100 Mbps ,



Tabel 3.3
Pengkuran Kinerja Pada Bidang Statistik

Sasaran	Program Kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintah untuk mempercepat pertukaran data	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan data/informasi sektoral	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten kota				
	Sub kegiatan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah data statistik yang terupdate	3 Jenis	17 Jenis	100%
	Sub kegiatan koordinasi data dan informasi elektronik	Jumlah data statistik yang tersedia	3 Jenis	13 Jenis	100%

Capaian Realisasi Bidang Statistik Pada Tahun 2022 terdapat dua sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dan Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik, di mana secara keseluruhan Program / Kegiatan/ sub kegiatan tersebut Pelaksanaannya mencapai 100 %.

Tabel 3.4
Pengkuran Kinerja Pada Bidang Sandi

Sasaran	Program Kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
	Program Aplikasi Informatika				
Terpenuhinya Fasilitas Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerag H yang telah menggunakan email berbasis sandi	54 OPD	26 OPD	48,1%

Capaian Realisasi Bidang Persandian Pada Tahun 2022 terdapat Satu Program yaitu Program Optimalisasi Keamanan Informasi, di mana secara keseluruhan program / kegiatan tersebut pelaksanaannya hanya mencapai 48.1% yang disebabkan karena TTD elektronik masih dalam tahap sosialisasi di tingkat organisasi perangkat daerah dan pada



tingkat kecamatan sehingga baru terdapat 26 OPD yang menerapkan penggunaan aplikasi TTD Elektronik dari 54 OPD yang menjadi target sehingga belum terlaksana 100% saat ini.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Bidang Umum /Kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022

Sasaran	Program Kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kinerja akuntabilitas	Program penunjang Urusan Pemerintah				
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Laporan Perencanaan tepat Waktu	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%

Tabel 3.6

Tabel Realisasi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2019- 2022

Indikator	Realisasi			
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Layanan Informasi Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat	1 App	1 App	1 App	1 App
Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat	5 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan layanan internet	9 OPD	9 OPD	9 OPD	9 OPD
Jumlah BTS yang diawasi	58 Unit	58 unit	52 unit	50 unit
Jumlah aplikasi layanan informasi	71 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan email berbasis sandi	26 OPD	26 OPD	-	-
Jumlah data statistik yang terupdate	17 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	1 Jenis
Jumlah data statistik yang tersedia	13 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	1 Jenis
Persentase Cakupan Laporan Perencanaan tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan pemeliharaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%



Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terhadap
Target Kinerja RPJMD

Sasaran	Indikator	Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses / layanan informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	3	2.08	6,24%
Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintah untuk mempercepat pertukaran data	Cakupan statistik dasar dan sektoral yang terintegrasi	Ada	Ada	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	B	BB	100%

Tabel 3.8
Tabel Program/Kegiatan Yang Menunjang Kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses	Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10.000.000	
2	Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses	Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	780.999.800	
3	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung jaringan Internet	Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah	1.094.804.000	
4			Kegiatan Pengelolaan E-Government dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
5	Jumlah BTS yang diawasi		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	422.943.650	



6	Jumlah Aplikasi Layanan Informasi		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	169.351.500	
7	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Email Berbasis Sandi		Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	154.998.700	
8	Jumlah Data Statistik yang terupdate		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	58.961.950	
9	Jumlah Data Statistik yang tersedia		Koordinasi Data dan Informasi Elektronik	51.037.950	
10	Persentase Cakupan Layanan Laporan Perencanaan tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	103.674.050	
11	Persentase Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.531.447.198	
12	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000	
13	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur		Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	560.791.500	
14	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	826.362.200	
15	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.404.900	
16	persentase cakupan pemeliharaan pelayanan administrasi perkantoran		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.950.000	
Total				7.150.727.398	

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung



keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembanguna e-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi;

1. Pengolahan Data;
2. Mengelolaan Informasi;
3. Sistem Manajemen;
4. Proses Kerja;

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2022 sebesar Rp. 6.981.665.758 atau mencapai 97,64 % dari anggaran sebesar Rp. 7.150.727.398 Realisasi Belanja per jenis belanja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana terdiri dari:

Tabel 3.9
Tabel Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses	Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10.000.000	10.000.000	100%
2	Jumlah Layanan Informasi yang dapat diakses	Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	780.999.800	749.816.138	96%
3	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung jaringan Internet	Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah	1.094.804.000	1.047.708.040	96%
4			Kegiatan Pengelolaan E-Government dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			



5	Jumlah BTS yang diawasi		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	422.943.650	422.589.260	100%
6	Jumlah Aplikasi Layanan Informasi		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	169.351.500	168.876.700	100%
7	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Email Berbasis Sandi		Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	154.998.700	154.742.300	100%
8	Jumlah Data Statistik yang terupdate		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	58.961.950	58.694.600	100%
9	Jumlah Data Statistik yang tersedia		Koordinasi Data dan Informasi Elektronik	51.037.950	46.748.000	92%
10	Persentase Cakupan Layanan Laporan Perencanaan tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	103.674.050	103.247.600	100%
11	Persentase Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.531.447.198	2.452.334.743	97%
12	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000	21.000.000	100%
13	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur		Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	560.791.500	558.314.760	100%
14	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	826.362.200	825.658.400	100%



15	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.404.900	199.266.482	99%
16	persentase cakupan pemeliharaan pelayanan administrasi perkantoran		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.950.000	162.668.735	100%
Total				7.150.727.398	6.981.665.758	98%

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000 dan terealisasi Rp. 10.000.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- b. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 780.999.800 dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 749.816.138 atau sebesar 96,01% dari alokasi anggaran

2. Program Aplikasi Informatika

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki subkegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.094.804.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.047.708.040 atau sebesar 95,70%
- b. Kegiatan e-government di lingkup pemerintah daerah yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
 - Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sebesar Rp. 422.943.650 dan terealisasi sebesar Rp. 422.589.260 atau sebesar 99,92% dari alokasi anggaran
 - Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dengan alokasi anggaran Rp. 169.351.500 dan terealisasi sebesar Rp.168.876.700 atau 99,72 % dari alokasi anggaran
 - Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.998.700 dan terealisasi Rp. 154.742.300 atau sebesar 99,83% dari alokasi anggaran
 - Pengelolaan pusat data pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.961.950 dan terealisasi 99,55% dari alokasi anggaran
 - Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.037.950 dan terealisasi sebesar Rp.46.748.000 atau sebesar 91,59% dari alokasi anggaran



3. Program Penunjang urusan Pemerintah

Pada program ini terdapat 7 kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.674.050 dan yang terealisasi sebesar Rp. 103.247.600 atau 99,59% dari alokasi anggaran
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.531.447.198 dan terealisasi sebesar Rp. 2.452.334.743 atau sebesar Rp. 96,87% dari alokasi anggaran
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000 dan terealisasi Rp. 21.000.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- d. Administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 560.791.500 dan terealisasi Rp. 558.314.760 atau 99,56% dari alokasi anggaran
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 826.362.200 dan terealisasi sebesar Rp. 825.658.400 atau 99,91% dari alokasi anggaran
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Rp. 201.404.900 dan terealisasi sebesar Rp. 199.266.482 atau 98,94% dari alokasi anggaran
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.950.000 dan terealisasi anggaran Rp. 162.668.735 atau sebesar 99,83% dari alokasi anggaran.

Faktor pendorong dari keberhasilan dari beberapa program kinerja dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Terjalinnnya koordinasi, kerjasama tim dan komunikasi yang baik antar bidang Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan Perangkat Daerah lain di kabupaten Bombana maupun diluar Kabupaten Bombana dan dengan Organisasi lain sehingga dapat memanfaatkan hasil yang maksimal dengan keterbatasan anggaran.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sudah tersedia meski terbatas dengan hasil yang maksimal.

Faktor penghambat dari Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.;
2. Keterbatasan dana/ anggaran dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan;
3. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan Informatika;
4. Masih banyak wilayah pada Kabupaten Bombana yang tidak terjangkau oleh sebaran informasi atau BlankSpot;
5. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya informasi dalam Kehidupan;
6. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan;



BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Keberhasilan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan isi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2019 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2022 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tahun 2019 dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi hingga tahun-tahun berikutnya.

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sebagaimana berikut:

1. Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak, dan media luar ruang belum optimal.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK, dan adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan perdesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK);
4. Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memanfaatkan fasilitas hosting Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sebagai penyedia layanan *hosting*.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi.
- 2) Menyediakan layanan TIK dan pemberdayaan masyarakat tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meminimalisasi masyarakat gagap teknologi melalui telecenter, workshop TIK, sosialisasi TIK di kabupaten Bombana.
- 3) Mengadakan Sosialisasi pengelolaan website terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Bombana.

- 4) Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standardisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 5) Mengadakan sosialisasi penggunaan dan penerapan tanda tangan elektronik di bidang sandi untuk semua Perangkat Daerah

4.2. Saran

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan informatika yang mempunyai fungsi antara lain: Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dan lain-lain, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana pada periode mendatang.

Bombana, Januari 2023

Kepala Dinas,



SOFIAN BACO, ST. M.PW

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19770909 200604 1 008

LAMPIRAN INDEKS SPBE YANG MERUPAKAN KEPMEN NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG NILAI HASIL SPBE 2022



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022; dan
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

-2-

- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (empat ratus lima puluh satu) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (seratus tiga) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

-3-

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

 ABDULLAH AZWAR ANAS

-17-

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3,43	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,42	Cukup
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1,54	Kurang
3	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	2,77	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,85	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pidie	2,03	Cukup
3	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,62	Kurang
4	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,47	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,13	Kurang
6	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,65	Kurang
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1,62	Kurang
8	Pemerintah Kab. Gayo Lues	1,62	Kurang
9	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,01	Cukup

-20-

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	1,64	Kurang
2	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,04	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Boalemo	2,02	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,06	Cukup
3	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	1,55	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Donggala	1,38	Kurang
2	Pemerintah Kab. Tolitoli	1,66	Kurang
3	Pemerintah Kab. Banggai	2,07	Cukup
4	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	1,51	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	1,03	Kurang
6	Pemerintah Kab. Banggai Laut	1,22	Kurang
7	Pemerintah Kab. Morowali Utara	1,67	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Takalar	1,96	Cukup
3	Pemerintah Kab. Luwu Timur	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Toraja Utara	1,77	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Konawe	1,70	Kurang
2	Pemerintah Kab. Buton	1,65	Kurang
3	Pemerintah Kab. Muna	1,38	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bombana	2,08	Cukup
5	Pemerintah Kab. Wakatobi	1,27	Kurang
6	Pemerintah Kab. Konawe Utara	1,61	Kurang
7	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	1,33	Kurang

Lampiran hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai		Ket.
		2021	2022	
a.	Perencanaan Kinerja	23,07	22,32	Turun
b.	Pengukuran Kinerja	13,44	20,67	Naik
c.	Pelaporan Kinerja	10,42	10,59	Naik
d.	Evaluasi Internal	6,27	17,25	Naik
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja	16,08		
	Nilai Hasil Evaluasi	69,28	70,83	Naik
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	Naik

Lampiran Cakupan statistik dasar dan sektoral yang terintegrasi

